

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN PKPU TERHADAP DEBITOR
YANG TELAH PUTUSAN HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Oleh

TOBIAS ADIKA SETYAKI

2140050082



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN PKPU TERHADAP DEBITOR
YANG TELAH PUTUSAN HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Tobias Adika Setyaki

2140050082



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila

To become the leading Faculty of Law in the Asian region by 2030 in the field, research and community service in the field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian values and Pancasila.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing law graduates who are able to use and develop science and technology in the field of law through scientific, interdisciplinary and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the global era.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing legal knowledge with national and international perspectives.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

Organizing sustainable education and professions in the field of law.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.

7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.

Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other fields of sciences.

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA:

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan;

Nama : Tobias Adika Setyaki
NIM : 2140050082
Program Studi : Hukum
Fakultas : Praktisi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis akhir yang berjudul “**Analisis Hukum Permohonan PKPU Terhadap Debitor Yang Telah Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tulis akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 4 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Tobias Adika Setyaki
NIM : 2140050082



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Analisis Hukum Permohonan PKPU Terhadap Debitor Yang Telah Putusan Homologasi
Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor
288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Oleh:

Nama : Tobias Adika Setyaki
NIM : 2140050082
Program Studi : Hukum
Peminatan : Praktisi Hukum

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 3 Februari 2026
Menyetujui:

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
(NUPTK: 5434757658137093)

Pembimbing II

Sangap Surbakti, S.H., M.H.
(NUPTK: -)

Ketua Program Studi Hukum

Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
(NUPTK: 5759741642230062)

Dekan

Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
(NUPTK: 5434757658137093)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Tobias Adika Setyaki
NIM : 2140050082
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul: “**Analisis Hukum Permohonan PKPU Terhadap Debitor Yang Telah Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
2. Sangap Surbakti, S.H., M.H.	Anggota	
3. Assoc. Prof. Dr. Wiwiek Sri Widiarty, SH., MH.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN PKPU TERHADAP DEBITOR YANG TELAH
PUTUSAN HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia


Nama : Tobias Adika Setyaki
NIM : 2140050082
Peminatan : Praktisi Hukum


Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 3 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,


Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
(NUPTK: 5434757658137093)


Sangap Surbakti, S.H., M.H.
(NUPTK: -)

Anggota Tim Penguji


Assoc. Prof. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH, MH
(NUPTK: 4259743644230083)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tobias Adika Setyaki
NIM : 2140050082
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Hukum Permohonan PKPU Terhadap Debitor Yang Telah Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 4 Februari 2026



Tobias Adika Setyaki
NIM : 2140050082

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat, berkat dan karunia yang diberikan Tuhan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu. Judul skripsi pada penelitian ini berjudul Analisis Hukum Permohonan PKPU Terhadap Debitor Yang Telah Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Skripsi ini dibuat oleh penulis karena merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bidang ilmu hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI). Meskipun penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hormat penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H, selaku Wakil Rektor Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama saya menempuh studi di Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi I (pertama) yang sangat baik hati kepada penulis serta bersedia meluangkan sedikit waktunya, membimbing, memberi masukan dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran, perhatian, arahan yang bijak dan dedikasi yang tinggi hingga bisa terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Kepada Bapak Sangap Surbakti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II (kedua) yang baik hati dan bersedia memberikan pengarahan serta

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi dengan penuh kesabaran, perhatian dan arahan yang bijak dan dedikasi yang tinggi. Kritik dan saran yang sangat bermanfaat dari bapak telah membantu penulis dalam meningkatkan kualitas skripsi ini dan menjadi salah satu acuan bagi penulis, untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Orangtua terkasih, mendiang Agus Harya Setyaki, S.S., S.H., LL.M dan Tri Gendri Ririasih, S.H., M.Hum yang telah memberikan doa dan dukungan penuh selama ini.
8. Kepada saudara-saudara saya, mas Krisnaldo Yogaprima Setyaki, S.Ak., mba Sherlita Ribka Rahayu, S.Ak., dan Mas Enrico Nanda Setyaki, S.T, terimakasih karena selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
9. Ezra Teofano dan Martin Luther, sebagai teman diskusi dan yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya selama menyelesaikan skripsi ini., Persahabatan dan dukungan kalian telah membuat saya lebih kuat dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang memiliki ambisi tinggi dalam belajar dan telah menjadi teman-teman seperjuangan, berbagi cerita dan pengalaman sejak Program Pembinaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak disengaja dalam penulisan tesis ini dan berharap tesis ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

Jakarta, 26 Januari 2026



Tobias Adika Setyaki

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	11
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
1. Tujuan Utama Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian.....	13
E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konseptual	17
F. METODE PENELITIAN.....	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. KERANGKA TEORITIS.....	25
1. Teori Kepastian Hukum.....	25
2. Teori Perlindungan Hukum	28
B. KERANGKA KONSEP	29
1. Pengertian PKPU.....	29
2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	31

3. Tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Sementara dan Tetap.....	33
C. RENCANA PERDAMAIAN DALAM PKPU	36
1. Pengertian dan Fungsi	36
2. Proses Penyusunan dan Persetujuan	38
D. TINJAUAN UMUM HOMOLOGASI	39
1. Pengertian Homologasi	39
2. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian	40
3. Syarat Formil dan Materil	42
4. Kekuatan Hukum Homologasi	43
BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HOMOLOGASI DALAM PERKARA NOMOR 288/PDT.SUS- PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST	45
A. DESKRIPSI SINGKAT PERKARA PKPU	45
1. Identitas Para Pihak	45
2. Alasan Pengajuan PKPU	46
3. Tahapan PKPU (Sementara dan Tetap).....	48
B. PROSES RENCANA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PKPU.....	54
A. Penyusunan dan perbaikan proposal perdamaian.....	54
B. Agenda dan Pelaksanaan Rapat Kreditor	55
C. Skema pembayaran Utang oleh Debitor (balloon, grace period, DES) 56	
D. Prosedur Pemungutan Suara (Voting).....	57
C. SYARAT DAN KETENTUAN HOMOLOGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU	58
1. Syarat formil dan materiil (Pasal 281 dan Pasal 285 UU No. 37 Tahun 2004).....	58
2. Ketentuan Kuorum dan Suara dalam Voting.....	60
3. Peran Hakim Pengawas dan Tim Pengurus.....	62
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PKPU PASCA PUTUSAN HOMOLOGASI.....	64
A. KEDUDUKAN DEBITOR PASCA HOMOLOGASI	64
1. Status Hukum Debitor Setelah Putusan Homologasi	64

2. Kewajiban Debitor Menjalankan Isi Perjanjian Perdamaian.....	68
3. Putusan Homologasi Sebagai Final and Binding (Mengikat Secara Hukum).....	70
B. POTENSI GAGALNYA PELAKSANAAN RENCANA PERDAMAIAAN ...	72
1. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Rencana Perdamaian	72
2. Faktor-Faktor Penyebab Debitor Tidak Menjalankan Isi Perdamaian .	73
3. Implikasi Hukum Terhadap Kreditor Jika Debitor Wanprestasi	75
C. MEKANISME HUKUM PEMBATALAN PERDAMAIAAN.....	77
1. Syarat dan Prosedur Pembatalan Perdamaian oleh Kreditor	77
2. Akibat Hukum dari Pembatalan Perdamaian: Debitor Dapat Dinyatakan Pailit.....	79
D. SYARAT KREDITOR YANG DAPAT MENGAJUKAN PKPU ATAU PAILIT KEMBALI TERHADAP DEBITOR	81
1. Perbedaan antara pembatalan perdamaian dan permohonan PKPU baru.....	81
2. Analisis Yuridis Terhadap Kemungkinan Pengajuan PKPU Ulang atau Pailit.....	83
3. Ketentuan Mengenai <i>ne bis in idem</i> dan Kepailitan Ulang	87
E. PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR.....	89
1. Hak Kreditor Jika Debitor Melanggar Perjanjian Perdamaian.....	89
2. Keseimbangan Antara Restrukturisasi dan sanksi hukum.....	91
3. Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam hukum PKPU.....	92
F. ANALISIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN	94
BAB V PENUTUP.....	99
A. KESIMPULAN	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Tobias Adika Setyaki
B. NIM : 2140050082
C. Program Kekhususan : Praktisi Hukum
D. Judul Skripsi : Analisis Hukum Permohonan PKPU Terhadap Debitor Yang Telah Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)
E. Halaman : ii-xv + 100 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran, Homologasi, Pembatalan Homologasi

G. Ringkasan isi :

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor yang telah memperoleh putusan homologasi dalam perkara Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt Pst. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah debitor yang telah menjalani PKPU dan memperoleh pengesahan perdamaian masih dapat kembali diajukan PKPU, serta bagaimana implikasi hukumnya ditinjau dari asas kepastian hukum dan perlindungan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan homologasi memiliki kekuatan hukum mengikat bagi debitor dan kreditor, sehingga isi perdamaian wajib dilaksanakan secara itikad baik oleh debitor. Apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur akibat hukum berupa pembatalan perdamaian dan kemungkinan dinyatakan debitor pailit. Dengan demikian, pengajuan PKPU kembali setelah adanya putusan homologasi menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi tidak sejalan dengan asas kepastian hukum dan dapat merugikan kreditor. Meskipun demikian, PKPU tetap memiliki fungsi penting sebagai sarana restrukturisasi utang dan perlindungan bagi kelangsungan usaha debitor. Oleh karena itu, penerapan PKPU perlu dilakukan secara konsisten, proporsional, dan berimbang agar kepentingan debitor dan kreditor sama-sama terlindungi.

- H. Daftar Acuan : 31 Buku + 5 Undang-undang + 8 Jurnal + 6 Internet
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Sangap Surbakti, S.H., M.H.

Jakarta, 26 Januari 2026
Penulis



Tobias Adika Setyaki

ABSTRACT

- A. Student Name : Tobias Adika Setyaki
B. S.I.N : 2140050082
C. Special Programs : Legal Practitioner
D. Thesis title : *Legal Analysis of the PKPU Petition Against a Debtor Who Has Received a Homologation Decision in Suspension of Debt Payment Obligations (Case Study of Decision Number 288/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)*
E. Pages : *ii-xv + 100 pages + bibliography + attachment*
F. Key Words : *Suspension of Debt Payment Obligations, Homologation, Cancellation of Homologation*

G. Content summary:

This study aims to analyze the petition for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) against a debtor who had previously obtained a homologation decision in Case Number 288/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga. jkt.Pst. The issues examined in this research concern the legal status of the debtor after homologation, the legal consequences of the debtor's failure to comply with the settlement agreement, and the possibility of filing PKPU again from the perspective of legal certainty and legal protection. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings indicate that a homologation decision has binding legal force on both the debtor and the creditors, thus the settlement agreement must be implemented in good faith by the debtor. If the debtor fails to comply with the settlement terms, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides legal consequences in the form of settlement cancellation and the possibility of the debtor being declared bankrupt. Therefore, filing PKPU again after a homologation decision raises legal issues because it may not align with the principle of legal certainty and may harm creditors. Nevertheless, PKPU remains important as a debt restructuring mechanism and as a means to preserve the debtor's business continuity. Accordingly, PKPU must be applied consistently, proportionally, and in a balanced manner so that the interests of both debtors and creditors are equally protected.

- H. Reference List : *31 books + 5 Constitution + 8 Journal + 6 Internet*
I. Supervisor I : *Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.*
Supervisor II : *Sangap Surbakti S.H., M.H*

Jakarta, 26 Januari 2026

Writer



Tobias Adika Setyaki